

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Untuk memahami politik luar negeri Amerika Serikat kita tidak bisa begitu saja mengabaikan sejarah yang telah dilalui Amerika Serikat dalam percaturan politik international di masa lalu. Setelah kemenangan Amerika Serikat dalam perang dingin dan menjadikan Negara tunggal yang *super power* sehingga dengan pencapaian atas kepentingan nasionalnya baik dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, demokrasi, maupun hak asasi manusia, menjadikannya Amerika Serikat membenarkan tindakannya untuk mencampuri urusan suatu Negara.

A. Karakteristik Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Politik Luar Negeri Amerika Serikat sama seperti politik luar negeri pada umumnya selalu bervariasi dan selalu berubah-ubah. Perubahan itu diakibatkan dengan adanya benturan baik dengan factor-faktor eksternal yakni benturan dengan situasi international yang sedang berkembang. Meski dalam pelaksanaannya politik luar negeri Amerika Serikat sering berubah-ubah namun pada dasarnya Amerika Serikat memiliki prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Sejak awal berdirinya Republik Amerika Serikat pada tahun 1796, para pembuat keputusan Luar Negeri Amerika Serikat selalu mempertimbangkan segi moralitas dan lingkungan international, sebagai landasan bagi sikap dan tindakannya

dalam melakukan interaksi international. Sehingga Amerika Serikat memiliki beberapa karakteristik dalam politik luar negerinya. Beberapa karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat adalah.

1. Isolasionis

Isolasionis adalah doktrin yang menuntut sebuah Negara akan membatasi hubugannya dengan Negara lain, khususnya hubungan politik hingga ke taraf yang paling minimum.¹¹

Doktrin ini bermula pada tahun 1796, pada saat Eropa sedang terlibat *Napoleonic War* selama dua decade.¹² Amerika Serikat menolak untuk ikut terlibat dalam perang tersebut dan juga dari Negara manapun. Pada tahun 1796 sampai awal abad 20 itulah Amerika Serikat menerapkan politik luar negeri yang bersifat Isolasionis tersebut. Hal ini terlihat dalam orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat itu, dimana kebijakan Amerika Serikat hanya terbatas pada dua tujuan yaitu, Amerika Serikat menghindari diri dari keterlibatan langsung yang akan membawa Amerika Serikat ke dalam persekutuan aliansi militer Negara Eropa serta keinginan Amerika Serikat untuk memelihara hegemonik politik di belahan bumi barat.

¹¹ Michael A. Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal.130.

¹² Charles W. Kegley, Jr., dan Eugene R. Wittkopf, *American Foreign Policy Pattern and Process*, Fifth Edition, St Martin's Press, New York, 1996, hal. 35.

Politik isolasionis ini pertama kali dikemukakan oleh presiden pertama Amerika Serikat, George Washington dalam pidato perpisahannya pada tanggal 17 september 1796, yang mendesak supaya menghindarkan diri dari politik dunia lama. Menurutnya:

Eropa telah menetapkan kepentingan utama, yang bagi kita sama sekali tidak ada atau sangat sedikit hubungannya. Oleh karena itu, Eropa harus terlibat dalam pertentangan yang sering terjadi, dan sebab-sebabnya pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan urusan kita melibatkan diri dengan ikatan yang palsu, dalam perubahan politik mereka yang biasa, atau gabungan serta bentrokan bisa dari persahabatan atau permusuhan.¹³

Kebijakan luar negeri yang isolasionis, mengakibatkan pada masa sebelum Perang Dunia I Amerika Serikat relatif tidak terlibat didalam percaturan dunia. Penerapan politik isolasionis juga di dukung oleh letak geografis Amerika Serikat yang dipisahkan oleh samudra luas di kedua sisinya. Letak yang demikian jelas menjauhkan Amerika Serikat dari pusat konflik dunia.

Menjelang perang dunia II yakni pada 1940-1966, Amerika Serikat lebih bersikap terbuka terhadap politik internasional. Terlebih ketika terjadi peristiwa *Pearl Harbour* pada tanggal 7 desember 1941 yang menimpa Amerika Serikat. Ketika Jepang menyerang pangkalan militer tersebut dan mengakibatkan tragedi bagi

¹³ Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa I*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, hal.

penduduk Amerika Serikat, mengakibatkan berubahnya arah politik internasional dari Isolasionis (Introversion) menjadi Internasionalisme (ekstroversion).

Pasca perang dingin yakni pada tahun 1986 kembali muncul desakan rakyat kembali kepada politik isolasionis, sebab menurut rakyat Amerika Serikat musuh utama Amerika Serikat yaitu Uni Soviet telah hancur, dan dirasakan bahwa Amerika Serikat tidak perlu banyak terlibat dengan persoalan dunia internasional dan rakyat Amerika Serikat menginginkan politik Amerika Serikat lebih menekankan pada masalah-masalah domestic. Dengan demikian ada berbagai macam perubahan arah politik luar negeri Amerika Serikat sejak abad 18 sampai 21 ini.

2. Ekspansionis

Ekspansionis adalah awal pecahnya politik isolasionalisme Amerika Serikat yang ditandai dengan peran aktif dalam politik internasional yang bertujuan untuk mempertahankan demokrasi barat. Kegiatan ekspansionis Amerika Serikat dimulai tahun 1869 dengan berkembangnya pemikiran liberal baru pada pokoknya menyarankan Amerika Serikat meniru gaya Inggris yang berhasil menjalankan politik kolonialisme.¹⁴ Kemauman Amerika Serikat untuk melakukan ekspansionisme ini didukung oleh keberhasilan di dalam negerinya membangun kekuatan politik dan ekonomi yang paling dinamis di seluruh dunia lantas dibarengi dengan penyebaran berbagai gagasan reformasi internasional.

¹⁴ Harwanto Dahlan, *Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat*, Lembaga Penerbitan IIMY

Keterlibatan dengan kekuatan luar ini mulai muncul pada saat terjadi *civil war* antara utara dan selatan. Tindakan ekspansionis pertama adalah pada tahun 1860 dengan membeli Alaska dari Rusia kemudian berkembang dengan melakukan ekspansionis ke Kuba, Amerika Latin dan berbagai pulau di Asia.¹⁵

Kebijakan luar negeri ekspansionis Amerika Serikat dilandasi atas dasar tanggung jawab moral bangsa Amerika Serikat untuk memelihara dan menciptakan kebebasan guna tercapainya perdamaian dunia yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang sangat mereka agung-agungkan.¹⁶

3. Netralis

Ciri politik luar negeri Amerika Serikat yang lain adalah netral. Netral adalah dimana suatu Negara tidak mengambil bagian dalam suatu perang dan menempatkan hak dan kewajibannya tertentu ditujukan pada Negara yang berperang, sikap ini mewarnai politik luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi gejolak Perang Eropa yang sedang berkecamuk waktu itu.¹⁷

Kebijakan luar negeri yang isolasionis dibarengi dengan karakteristik dengan politik luar negeri Amerika Serikat yang netral. Sikap netral Amerika Serikat dilator belakang oleh pidato George Washington yang menyatakan bahwa "Amerika Serikat akan tetap bersikap netral dalam konflik di Eropa". Kebijakan sikap netral masih

¹⁵ Charles W. Kegley, Jr., dan Eugene R. Wittkopf, op cit., hal. 36.

¹⁶ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional Persepsi Nasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 60.

¹⁷ Harwanto Dahlan, op cit. hal. 82

mempertahankan di masa pemerintahan Monroe yang menetapkan garis kebijakan Amerika Serikat yang pertama dan utama yaitu, bahwa kita tidak akan pernah melibatkan diri dalam kancah pertikaian Eropa, tidak memperbolehkan Eropa mencampuri masalah Atlantik Amerika Utara dan Selatan mempunyai seperangkat kepentingan yang berbeda dengan kepentingan Eropa serta mempunyai ciri tersendiri.¹⁸ Politik luar negeri yang netral ini dipegang sampai menjelang Perang Dunia II dan dinyatakan tiga kali dalam Undang-Undang Dasar yang mana salah satunya *The Neutrality Act* yang diratifikasikan oleh Kongres pada tahun 1937.¹⁹

4. Intervensi

Paska keberhasilan memimpin dan memenangkan Perang Dunia II, Amerika Serikat memperoleh kepercayaan diri tinggi untuk terus melakukan kebijakan-kebijakan luar negeri tinggi yang lebih berani. Paska Perang Dunia II ini kemudian dianggap sebagai Era perpindahan tugas barat dalam menciptakan apa yang mereka sebut dengan takdir menguasai dunia (*manifest destiny*)²⁰ yang sebelumnya di tanggung oleh Inggris, Prancis dan Spanyol kepada Amerika Serikat.

Maka Amerika Serikat-pun memulai politik intervensinya yang menandakan pula keruntuhan politik isolasi dan netral. Indikasi politik intervensi ditunjukkan dengan sikap campur tangan Amerika Serikat dalam berbagai urusan, seperti

¹⁸ William L. Bradley dan Mochtar Lubis, *Dokumen-Dokumen Pilihan tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia*, Yayasan Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 21.

¹⁹ Harwanto Dahlan, op. cit., hal. 82.

²⁰ Jane I. Smith, Op.Cit.,hal.62

masalah-masalah internasional pada umumnya dan masalah bangsa-bangsa lain khususnya.

Bentuk intervensi Amerika Serikat pada awalnya adalah dengan pandangan bahwa Amerika Serikat harus memberikan kontribusi demi menyeimbangkan dunia, sehingga kemudian terbentuklah organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa, atau United Nations, juga North Atlantic Treaty Organization (NATO) sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi dunia internasional dalam setiap kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Dengan keputusan Senate Amerika Serikat pada tanggal 4 Desember 1945 Amerika Serikat kemudian bergabung dengan PBB, bahkan Amerika Serikat kemudian menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Posisi Amerika Serikat yang terlihat istimewa dan cenderung lebih tinggi daripada bangsa lain ini membawa Amerika Serikat untuk memanfaatkan politik intervensinya dalam memperoleh keuntungan-keuntungan termasuk keistimewaan keanggotaan dalam dewan keamanan PBB dengan Hak Vetonya.

5. Perang Dingin

Dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengubah arah politik luar negeri Amerika Serikat setelahnya. Dengan berpijak pada doktrin trauma Amerika Serikat memulai apa yang disebutnya sebagai "*The United States as The Leader of The Free World*", yang disampaikan dihadapan kongres, dalam doktrinnya Trauman menyatakan bahwa untuk mencapainya Amerika Serikat harus mendukung Demokrasi dan menolak Komunis Uni Soviet

Inilah babak baru politik luar negeri Amerika Serikat, doktrin Trauman ini kemudian didukung dengan kebijakan *containment*, kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah meluasnya ideology Komunis Uni Soviet, yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan sekutunya, termasuk Cina.

Kebijakan *containment* membawa Amerika Serikat melakukan kontak senjata dengan Negara-negara yang dianggap menjadi sasaran penyebaran ideology komunis. Diantaranya yang paling awal adalah perang Korea tahun 1950, invasi teluk babi tahun 1961, Krisis rudal Kuba di tahun berikutnya, perang Vietnam tahun 1957 dan berakhirnya pada 1975, terakhir adalah pendudukan Uni Soviet di Afghanistan tahun 1979.

Pada akhirnya perang ini berakhir dengan kekalahan Uni Soviet yang ditandai dengan bubaranya Uni Soviet tahun 1992, selain itu pembubaran ini juga menandakan kekalahan ideology komunis dan mengantarkan demokrasi liberal sebagai kekuatan ideology baru, Negara-negara Uni Soviet-pun kemudian banyak ikut masuk dalam pendukung demokrasi liberal.

6. New World Order

Kekalahan Uni Soviet, yang kemudian membubarkan diri, membawa Amerika Serikat pada pencapaian sebagai World Power tunggal. Namun kondisi ini menuntut Amerika Serikat untuk segera melanjutkan transformasi politiknya, mengingat kondisi politik internasional yang mengalami ketidakstabilan terutama karena teriadinya konflik dimana-mana.

Tahun 1992 menandai cara pandang politik luar negeri Amerika Serikat, masih di bawah pemerintahan George H. W. Bush (Bush Senior) mengeluarkan Draft Pedoman dan Rencana Pertahanan (defence Planning Guidance Draft) yang secara garis besar menyatakan tentang kebijakan untuk menghalau segala bentuk musuh baru yang dapat menjatuhkan kepemimpinan Amerika Serikat.²¹

Kebijakan ini kemudian berkembang lagi dibawah kepemimpinan George W. Bush (Bush Junior), dimana Bush menyempurnakan kebijakan pre-emptive strike Bush Senior, salah satunya, dengan kebijakan *counterterrorism* dalam mempertahankan dunia yang Unipolar setelah perang panjang dalam Cold War. Dengan kebijakan ini arah politik Amerika Serikat saat membentuk sebuah visi neo-imperial dimana Amerika Serikat melekatkan pada dirinya sendiri sebuah peran global, diantaranya, peran menetapkan standart, menentukan ancaman, menggunakan kekuatan, dan menegakkan keadilan.²²

B. Kepedulian Amerika Serikat terhadap Israel di Timur Tengah

Banyak sekali bukti adanya kepedulian Amerika Serikat terhadap Israel di Timur Tengah. Memang tidaklah bias ditampik bahwasanya Amerika Serikat lah biang dari kekuatan Israel di Timur Tengah. Sebenarnya kekuatan apa yang membuat

²¹ Defense Planning Guidance Draft, www.newamericancentury.org, yang diakses pada 20 Mei 2011.

²² Amerika dan Dunia. (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2005), hal.433.

Israe kuat di Timur Tengah dan kebijakan-kebijakannya sangatlah susah untuk digoyahkan. Lagi-lagi andil besar AMerika Serikat lah yang terlihat disini.

Kekuatan kekuatan apa yang berada di balik keberhasilan bangsa Yahudi dalam membeli kebijakan luar negeri Amerika serikat ,sehingga negara Zionis tersebut senantiasa mendapat keuntungan berbagai dalam percaturan masyarakat intenasional karena terdapatnya andil besar Amerika Serikat didalamnya . Kekuatan kekuatan tersebut telah menyebabkan Gedung Putih tidak berketik dihadapan organisasi organisasi Zinonisme internasional yang beroperasi diberbagai belahan dunia dibawah kordinasi induk semangnya Freemasonry, yang tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara Israil di Palestina itu. Tetapi organisasi Freemasonry yang banyak kalangan sejarawan berbeda persepsi kapan dan dimana munculnya itu, namun keberadaannya sangat jelas dalam berbagai ragam sepak terjangnya di dunia internasional.Menurut salah seorang orientalis kenamaan, bahwa Freemasonry merupakan sekumpulan besar dari mazhab mazhab yang berbeda ,namun berkerja hanya untuk satu tujuan, yakni membangun kuil kembali, karena kuil merupakan lambang negara Israil. Sementara tentang bilamana organisasi Freemasonry tersebut pertama sekali muncul terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang dengan jelas menyebutkan bahwa Freemasonry sudah ada sejak zaman Nabi Musa AS serta ada pula yang mengatakan sudah ada sejak zaman

Herods II. Akan tetapi yang jelas, bahwa nama Freemasonry digunakan secara terbuka sejak tahun 1717 oleh majlis Raya Freemasonry di Kerajaan Inggris.²³

Banyak sekali bukti sejarah yang membuktikan bahwa banyaknya pembelaan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Israel. Seorang pakar politik dari Timur Tengah, DR. Rif'at Sayyid Ahmad, mengemukakan 66 bukti dukungan AS terhadap Israel sejak 83 tahun yang lalu, sebelum Negara Israel berdiri di Tanah Palestina:

1. Sesaat setelah perjanjian Balfour di tandatangi pada tanggal 2 Februari 1917, Presiden Amerika langsung memberikan konferensi pers: "Saya pribadi dan atas nama Presiden, sangat bangga dengan sikap Negara koalisi dan rakyatnya yang setuju dengan berdirinya Negara Yahudi Israel di Palestina dan saya sendiri mendukung secara mutlak berdirinya Negara Israel
2. Pada 11 September 1922: Senator dan Konggres Amerika mengeluarkan keputusan tentang dukungan penuh mereka atas berdirinya Negara Israel di Palestina untuk menampung bangsa Yahudi yang tersebar di dunia.
3. Pada 11 Mei 1942: Konferensi Zionis Internasional di selenggarakan di hotel Baltimore New York yang mengeluarkan keputusan untuk merubah Palestina menjadi Negara Yahudi, mengusir semua warga Arab yang ada di dalamnya. Presiden Amerika Roosevelt langsung memberikan dukungan atas hasil konferensi Zionis itu.

²³ <http://www.islamtimes.org/udcfoudt.w6dmta8.1w.html>

4. Tanggal 16 Maret 1945: Presiden Amerika Roosevelt mengadakan pertemuan dengan salah seorang Ketua Zionisme DR. Stephan Weiz. Presiden Amerika menjelaskan bahwa ia sebagai Presiden sudah mempunyai sikap yang tegas terhadap rencana Zionisme itu.

5. Pada 16 Agustus 1945: Presiden Amerika Truman memberikan dukungan penuh untuk mengeksodus sebanyak mungkin orang Yahudi ke Palestina, hal itu ia sampaikan dalam sebuah konferensi pers.

6. Tanggal 31 Agustus 1945: Presiden Amerika Truman mengirim surat resmi kepada Perdana Menteri Inggris Clamant Attlee, meminta agar segera mengizinkan 100 ribu Yahudi di Inggris untuk di kirim ke Palestina.

7. Tanggal 5 Mei 1946: Presiden Amerika Truman menekan Perdana Menteri Inggris untuk menerima 100 ribu pendatang Yahudi di Palestina dan Amerika akan membantu mengangkutnya

8. Pada 14 Oktober 1946: Presiden Truman juga mengeluarkan surat keputusan yang isinya menganjurkan semua orang Yahudi ke Palestina tanpa menunggu hasil akhir proses politik dan militer tentang penjajahan Palestina oleh Inggris.

9. Tanggal 29 November 1947: Amerika Serikat melakukan tekanan intensif kepada beberapa Negara, untuk mendukung voting pemecahan Palestina untuk menjadi dua wilayah antara Yahudi dan bangsa Arab.

10. Pada tanggal 14 Mei 1948: hanya berselang 10 menit terbentuknya Negara Israel , Presiden Amerika Truman langsung mengumumkan mengakui Negara Israel dan langsung membuka hubungan diplomatik secara resmi.

11. Tanggal 29 Mei 1965: Komisi Hubungan Luar Negeri di Kongres Amerika memutuskan untuk mengurangi bantuan kepada pengungsi Palestina.

12. Pada tanggal 12 Juni 1966: pemerintah AS menekan Badan Keamanan PBB agar menghentikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina yang melakukan pelatihan militer dan membentuk milisi perlawanan kepada Israel .

13. Pada 2 Agustus 1966: Presiden Amerika Johnson menjelaskan bahwa politik AS akan terus mendukung eksistensi Israel dan akan membantunya untuk menjadi Negara super power di kawasan Timur Tengah.

14. Pada tanggal 3 Oktober 1966: AS mengajukan proyek perdamaian antara Suriah dan Israel dan tuntutan agar keduanya jangan melakukan hal-hal yang akan menjadikan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah memanas.

15. Pada bulan January 1979: Presiden Amerika dalam sebuah pertemuan dengan para tokoh terkemuka Zionis Amerika, menegaskan bahwa AS tidak akan membuka peluang pembicaraan dengan PLO (Palestine Liberation Organization)

Dari data-data di atas menguatkan bahwasanya terhadatnya andil besar Amerika Serikat terhadap berbagai situasi di Israel semenjak 1979. Hal sejarah inilah yang menadasari kuatnya dukungan Amerika Serikat terhadap Israel sampai saat ini.²⁴

C. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Mesir-Israel Sebelum 1979

Politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Mesir dan Israel sudah terjadi sebelum masa kepemimpinan Presiden husni Mubarak atau sebelum tahun 1981. Dengan melihat jauh kebelakang akan terkuak bagaimana Amerika Serikat sudah turut mencampuri perpolitikan antara Mesir dan Israel. Hal ini tidak dapat dibantahkan karena bagaimanapun Negara Israel merupakan bisa dibilang sebagai “anak emas” Amerika Serikat.

Melongok ke masa lalu, Bagaimana rakyat Mesir terus diperintah oleh sosok yang kuat dan cenderung militeristik. Pada abad-19, Mesir dikuasai oleh Inggris yang menginginkan bagian laba keuntungan dari Terusan Suez. Inggris menaikkan seorang sultan yang menjadi pemerintahan boneka. Bahkan status Negara Mesir saat itu adalah protektorat dari Inggris.

Hingga pada 28 Februari 1922, Inggris memberikan kemerdekaan bagi Mesir. Sarwat Pasha diangkat menjadi perdana menteri. Namun Mesir tetap dipimpin oleh seorang raja, Farouk Pengaruh Inggris masih dominan dalam mencampuri situasi politik, ekonomi, dan pemerintahan di Negara Mesir.

²⁴ <http://pratomadiary.blogspot.com/2009/01/66-bukti-sejarah-pembelaan-amerika.html>

Titik balik terjadi di 1952, yang dikenal sebagai Revolusi Mesir tahun 1952. Pada 22-26 Juli 1952 militer Mesir melakukan kudeta terhadap Raja Mesir, Farouk. Aksi militer ini dipicu oleh situasi ekonomi di Negara Mesir yang tak kunjung membaik dan Negara Mesir kalah perang dengan Negara Israel pada 1948 yang dimana mulai saat itulah perekonomian di Mesir mulai bergejolak. Sehingga membuat khawatir Negara-Negara barat yang mempunyai kepentingan di kawasan Timur Tengah, salah satunya adalah Amerika Serikat. Mulai dari sinilah Amerika Serikat menempatkan politik luar negerinya di Timur Tengah dengan Negara Mesir khususnya tentu pula ada Negara Israel dibaliknya. Negara Uni Soviet dan Amerika Serikat ada di belakang aksi militer ini dalam mengkudeta Raja farouk. Keikutsertaan Amerika Serikat berlangsung ketika saat itu Amerika Serikat mulai menyadari adanya situasi yang kritis apabila situasi ini tidak kunjung membaik dan andaikan perekonomian Mesir tidak kunjung membaik akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan dan isu-isu yang diangkat Amerika Serikat di Timur Tengah. Keterlibatan Israel juga bermula dari bagaimana Negara Israel menang terhadap Mesir dalam perang yang terjadi tahun 1948 tersebut. Letjen Muhammad Naguib menjadi Perdana Menteri Mesir sekaligus Presiden. Salah satu bawahan Naguib adalah seorang perwira kharismatik bernama Gamal Abudl Nasser. Di masa ini, para perwira militer mendeklarasikan Mesir sebagai negara republik, bukan lagi kerajaan.

Dibawah Naguib, Nasser diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri. Dua tahun setelah menjadi wakil, Nasser bermanuver dan menjadi Perdana Menteri Mesir. Krisis politik kembali terjadi di Mesir, dan membuat

Presiden sekaligus atasan Nasser, Muhammad Naguib tergeser dari pemerintahan dan menjadi tahanan rumah.

Nasser resmi menjadi Presiden Mesir. Sebagai wakilnya, ia menunjuk beberapa orang, termasuk rekan dekatnya Anwar Sadat. Dibawah Nasser, Mesir terlibat sejumlah perang dengan negara tetangga seperti Perang Yaman pada 1962, dan Perang Israel 1967. Kekalahan Mesir di perang ini menjadi titik balik karier Nasser yang gemilang di Timur Tengah. Pada 1970, Nasser terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Pemerintah langsung menaikkan Anwar Sadat sebagai pengganti Nasser, tanpa melalui pemilu.

Mesir di era Anwar Sadat semakin kontroversial, bagi negara-negara Arab lain. Pada 1971, Anwar Sadat menandatangani traktat pertemanan dengan Uni Sovyet. Dua tahun setelah itu, Mesir kembali berperang dengan Israel, merebutkan Dataran Sinai. Israel kalah dan Mesir kembali menduduki Sinai. Pada 1977, secara mengejutkan, Sadat mengunjungi Israel. Setahun kemudian, Sadat kembali membuat kontroversi dengan menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel dibawah Amerika Serikat. Pada 26 Maret 1979 Presiden Amerika Serikat saat itu Jimmy Carter, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian perdamaian yang diberi nama 'Camp David'. Ini adalah kesepakatan perdamaian pertama antara Negara Israel dan sebuah negara Arab terbesar dan terpenting, yaitu Mesir. Menurut Jimmy Carter: "Dua pemimpin besar antar dua Negara. Dan ini sangat berarti bagi sejarah di negaranya yaitu Presiden Mesir Anwar

el-Sadat dan Perdana Menteri Menachem Begin telah bertarung dengan menunjukkan keberanian yang lebih tinggi, keuletan dan inspirasi, bagaikan seorang jenderal saat memimpin pasukan dan persenjataan di medan perang."

Dua tahun sebelumnya, Presiden Sadat tanpa diduga menyatakan, dia bersedia untuk "pergi ke ujung dunia, bahkan ke parlemen Israel Knesset" demi mencapai perdamaian di wilayah itu. Padahal saat itu di Israel dan di negara lain, harapan perdamaian lenyap setelah kubu nasional sosialis pimpinan Menachim Begin meraih kemenangan. Tapi, Begin mengundang Sadat yang kemudian datang ke Yerusalem. Setahun setelah sejumlah perundingan perdamaian yang intensif, "Perjanjian Camp David" akhirnya dicetuskan.

Berbagai politisi dunia mengikuti penandatanganan perdamaian yang dilaksanakan di depan Gedung Putih. Tapi, wakil dunia Arab tidak mengahadirinya. Bahkan Palestina juga tidak. Mereka menentang perjanjian yang mereka sebut sebagai kesepakatan separatis. Mereka memboikot Presiden Mesir, Anwar Sadat yang meskipun demikian tak gentar menghadapi tantangan tersebut: "Rakyat Mesir dengan warisan budaya yang besar dan kesadaran atas nilai sejarahnya yang unik, sejak awal mengerti arti dan pentingnya upaya ini.

Bagi Anwar Sadat senditi ini bukanlah perjanjian perdamaian separatis. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah Palestina. Dalam perjanjian Camp David disebutkan tentang otonomi Palestina dengan jangka waktu

terbatas sebagai transisi menuju negara yang berdaulat. Upaya ini gagal karena secara umum ditolak. 14 tahun kemudian di Oslo, Palestina baru bersedia mencapai kesepakatan mirip dengan Israel. Dari pihak Israel, Menachem Begin, pemimpin partai nasionalis Herut yang menandatangani kesepakatan itu: "Saya datang dari tanah Israel, tanah zionis dan dari Yerusalem. Di sini saya berdiri dengan rendah hati dan bangga, sebagai seorang putra bangsa Yahudi, sebagai salah seorang dari generasi Holocaust."

Lagi-lagi terlihat campur tangan Amerika Serikat dalam hubungan antara Mesir dengan Israel. Terbukti dalam perjanjian Camp David tersebut. Walaupun dalam perundingan ini Amerika Serikat hanya terlihat sebagai penengah dan tuan rumah untuk perundingan tersebut. Tentunya bisa dipastikan Amerika Serikat ikut serta tidak hanya sebagai penengah, namun sebagai pihak yang turut mengambil keputusan dalam perundingan tersebut, karena baik buruknya hubungan antara Negara Mesir dan Negara Israel akan berpengaruh terhadap perpolitikan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Lewat manuver yang dilakukan Anwar Sadat inilah, hubungan antara Amerika Serikat dan Mesir semakin mesra. Amerika Serikat banyak memberikan Negara Mesir dengan dana bantuan bermiliar dolar AS. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa Amerika Serikat menempatkan politik luar negerinya dengan banyak member bantuan berupa dana. Dibawah Anwar Sadat, secara perlahan, seorang perwira bernama Hosni Mubarak, mendekat ke pusat kekuasaan Mesir. Pada 6 Oktober 1981,

Anwar Sadat tewas dibunuh. Dan mengulang kasus Nasser, maka Hosni Mubarak langsung naik dari jabatan wakil presiden menjadi presiden tanpa melalui pemilu.

Husni Mubarak pun menjadi wakil presiden Anwar Sadat sejak tahun 1975. Pada tahun 1973 saat Mesir berperang melawan Negara Israel, Husni Mubarak menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Mesir. Ia lulusan sekolah penerbang di Uni Sovyet. Anwar Sadat memilih dirinya, konon, karena menilai Husni Mubarak tidak memiliki ambisi politik yang macam-macam di militer maupun di partai tunggal Mesir, Partai Nasional Demokratik.²⁵

²⁵ <http://www.suaranews.com/2011/02/membongkar-rahasia-besar-antara-penerus.html>